

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)  
TAHUN 2022**



**BANK DAERAH BANGLI**

**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI  
TELEPON: (0366) 91054**



## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan POJK Nomor 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/ SEOJK 03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, maka berdasarkan hal tersebut PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) membuat serta melaporkan hasil dari pelaksanaan Tata Kelola yang telah diterapkan. Laporan ini selain untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat pula digunakan untuk kepentingan Stakeholder untuk mengetahui secara jelas tentang kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tata Kelola perusahaan yang baik juga didukung dengan berbagai unsur-unsur penting yang meliputi peran aktif seluruh Karyawan Bank, penerapan fungsi kepatuhan yang efektif, pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko yang optimal. Tata Kelola yang dilaksanakan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders (pemangku kepentingan) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola.

PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) sebagai Lembaga Intermediasi harus memastikan bahwa seluruh bagian dalam perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yaitu antara lain:

1. Keterbukaan (transparency)
2. Akuntabilitas (accountability)
3. Pertanggungjawaban (responsibility)
4. Independensi (independency)
5. Kewajaran (fairness)

Untuk tercapainya PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) yang sehat, maju dan berkembang, maka dengan ini kami berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (TATA KELOLA-GCG) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola.



## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	<p><b>Nama</b> IRI MADE ASTAWA</p> <p><b>NIK</b> 5106031710600003</p> <p><b>Jabatan</b> Direktur Utama</p> <p><b>Tugas dan Tanggung Jawab</b></p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja BPR</li><li>2. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas di Bagian Umum dan SDM, Bagian Operasional dan SPI</li><li>3. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Direksi berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian</li><li>4. Memastikan dukungan sarana, prasarana termasuk informasi dan Teknologi serta sumber daya manusia untuk kelancaran operasional dalam mencapai sasaran bisnis</li><li>5. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direktur Bisnis, apabila Direktur Bisnis berhalangan hadir karena sakit, cuti atau melaksanakan tugas Dinas</li></ol>
2	<p><b>Nama</b> I WAYAN KARDI, S.E</p> <p><b>NIK</b> 5106043112650164</p> <p><b>Jabatan</b> Direktur</p> <p><b>Tugas dan Tanggung Jawab</b></p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Bisnis</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bertanggung jawab atas pencapaian penghimpunan dana dan masyarakat</li><li>2. Bertanggung jawab atas penyaluran dana kepada masyarakat sesuai sasaran yang telah ditetapkan</li><li>3. Menetapkan cara cara penagihan kembali atas kredit yang telah diberikan kepada debitur yang menunggak secara efektif dan efisien</li><li>4. Menyelenggarakan peghapusbukuan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan</li><li>5. Melaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris yang disertai dengan langkah-langkah perbaikan yang sedang dan/atau akan dilakukan mengenai:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Perkembangan dan jumlah dana yang dapat dihimpun dari tabungan dan deposito berjangka, serta sumber sumber dana lainnya</li><li>b. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dan debitur inti.</li><li>c. Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit non performing</li><li>d. Menindaklanjuti temuan-temuan penting dalam perkreditan dan dana yang merupakan laporan hasil pengawasan oleh pengawas intern maupun ekstern</li><li>e. Pelaksanaan rencana perkreditan dan penghimpunan dana sebagaimana tertuang</li></ol></li></ol>



**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI**

Telepon (0366) 91054

Website bankdaerahbangli.co.id Email info@bankdaerahbangli.co.id

dalam rencana kerja yang disampaikan kepada OJK

f Memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan bank) dan perkembangan kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis bank

g Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas di Bagian Pemasaran, Pembinaan dan Pengawasan Debitur dan Bagian Kredit

h Menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab Direktur Utama pada saat Direktur Utama berhalangan hadir karena sakit, cuti atau melaksanakan tugas Dinas

3 Nama I NENGAH PICARAWAN, S.H

NIK 5106033112630288

Jabatan Direktur

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan

1 Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh POJK dan perundang undangan lainnya dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dan peraturan

2 Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan

3 Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain

4 Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang undangan lain yang relevan atau ketentuan/SOP intern.

5 Meminimalkan risiko kepatuhan Bank.

6 Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR

7 Melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris terkait pelanggaran Kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi

8 Melaporkan secara khusus terkait kebijakan Direksi/Keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Dir Kep telah menyimpang dan POJK dan/ atau peraturan perundang-undangan lainnya dan laporan ini disampaikan kepada OJK

9 Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis

10 Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi

11 Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait manajemen risiko

12 Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen

13 Mengevaluasi, memberikan opini atau rekomendasi terhadap transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

14 Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank

15 Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang undangan yang berlaku

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

Sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris, dapat disampaikan tindak lanjutnya sebagai berikut

1 Telah diisi jabatan SPI dan staf fungsional auditor pada tanggal 5 September 2022

2 Telah ditetapkan dan dilaksanakan secara rutin kegiatan sabtu belajar sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas SDM

3. Telah diberikan reward kepada pegawai dengan 5 (lima) kategori, dimana masing-masing kategori terdiri dari juara 1 sampai juara 3 Untuk juara 1 di masing-masing kategori diberikan



reward berupa pendidikan reguler gratis dengan jenis program pendidikan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Nihil

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, M.M
	NIK	: 5106022610640002
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengawasan BPR.</li><li>2. Meneliti rencana strategis bisnis (Corporate Plan) rencana kerja tahunan dan anggaran BPR sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.</li><li>3. Memberi saran dan pertimbangan diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan BPR.</li><li>4. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPR.</li><li>5. Minta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR.</li><li>6. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tanggung jawab Direksi yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.</li><li>7. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>8. Mengkoordinasikan tugas-tugas Anggota Dewan Komisaris.</li></ol>	
2.	Nama	: Drs. I Gede Suryawan, M.Si
	NIK	: 5106021711590001
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direktur Bisnis dalam menjalankan operasional BPR yang meliputi di bidang perkreditan dan penghimpunan dana.</li><li>2. Meneliti rencana kerja dibidang perkreditan, portofolio KAP dan penghimpunan dana pihak ketiga sebelum diserahkan ke Kepala Daerah untuk disahkan.</li><li>3. Mengawasi dan meneliti neraca, laporan laba rugi yang disampaikan oleh Direktur Utama untuk mendapatkan pengesahan Kepala Daerah.</li><li>4. Meneliti kinerja Direktur Bisnis dalam menjalankan tugas sesuai struktur organisasi.</li><li>5. Memohon keterangan kepada Direktur Bisnis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR khususnya dibidang Perkreditan dan penghimpunan dana pihak ketiga.</li><li>6. Mengawasi, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi terkait tugas dan tanggung jawab Direktur Bisnis dalam pelaksanaan kebijakan dibidang Perkreditan dan penghimpunan dana pihak ketiga.</li></ol>	



**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI**

Telepon: (0366) 91054

Website: bankdaerahbangli.co.id. Email: info@bankdaerahbangli.co.id

3.	Nama	: Sang Putu Sukarasa, S.H.
	NIK	: 5106031808740001
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
		1. Mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
		2. Melaksanakan pengawasan terhadap BPR untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
		3. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal dan rekomendasi dari Auditor Eksternal serta hasil pengawasan pihak Otoritas.
		4. Menilai kinerja Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugasnya sesuai POJK Nomor 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan POJK Nomor 13/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
		5. Meminta keterangan kepada Direktur Kepatuhan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tata kelola dan Manajemen Risiko.
		6. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh BPR agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		7. Memberikan pertimbangan kepada Direktur Kepatuhan terkait temuan yang wajib dilaporkan kepada OJK seperti :
		a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan.
		b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR.
		c. Kondisi ini wajib dilaporkan paling lambat 10 hari kerja sejak diketahui.
		8. Melakukan pengawasan dan memberikan saran terkait kelengkapan sarana dan prasarana pendukung dan ketersediaan serta kualitas SDM dalam mengoptimalkan operasional dan bisnis BPR.
	Rekomendasi Kepada Direksi :	
	Rekomendasi :	
		1. Guna terlaksananya Tata Kelola Perusahaan yang baik, maka Jabatan SPI dan Auditor agar segera diisi
		2. Guna terwujudnya target-target perusahaan perlu didukung dengan kualitas SDM, oleh karena itu pelatihan SDM agar dilaksanakan secara konsisten.
		3. Untuk mendorong pegawai berlomba-lomba untuk berprestasi dalam upaya mencapai target perlu diberikan penghargaan baik dalam bentuk material maupun non material. Pemberian penghargaan tersebut agar diberikan secara berkelanjutan.
	Penjelasan Lebih Lanjut :	
	Nihil	

**3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)**

**a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite**

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada



2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab Tidak ada
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite Bank Daerah Bangli tidak memiliki Komite Audit	

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

No	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1					
2					
3					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			tidak ada	Rekomendasi struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota komite	struktur, independensi

**c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit Program Realisasi Jumlah Rapat
2	Komite Pemantau Risiko Program Realisasi Jumlah Rapat
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Program Realisasi Jumlah Rapat
Penjelasan Lebih Lanjut tidak ada program kerja dan realisasi program kerja komite	



## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No. :	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	IRI MADE ASTAWA	5106031710600003	Rp0,00	0%
2.	I WAYAN KARDI, S.E.	5106043112650164	Rp0,00	0%
3.	I NENGAH PICARAWAN, S.H.	5106033112630288	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut : Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR tidak ada				

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No. :	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	IRI MADE ASTAWA	5106031710600003	-	-	0%
2.	I WAYAN KARDI, S.E.	5106043112650164	-	-	0%
3.	I NENGAH PICARAWAN, S.H.	5106033112630288	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut : Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan lain tidak ada					





**C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	IRI MADE ASTAWA	5106031710600003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I WAYAN KARDI, S.E.	5106043112650164	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	I NENGAH PICARAWAN, S.H.	5106033112630288	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Hubungan keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada					

**2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	IRI MADE ASTAWA	5106031710600003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	I WAYAN KARDI, S.E.	5106043112650164	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	I NENGAH PICARAWAN, S.H.	5106033112630288	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Hubungan keluarga anggota Direksi pada BPR tidak ada					



## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, M.M	5106022610640002	Rp0,00	0%
2	Drs. I Gede Suryawan, M.Si	5106021711590001	Rp0,00	0%
3	Sang Putu Sukarasa, S.H	5106031808740001	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut Kepemilikan saham anggota dewan komisaris pada BPR tidak ada				

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, M.M	5106022610640002	-	-	0%
2	Drs. I Gede Suryawan, M.Si	5106021711590001	-	-	0%
3	Sang Putu Sukarasa, S.H	5106031808740001	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain tidak ada					



**E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, M.M	5106022610640002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Drs. I Gede Suryawan, M.Si	5106021711590001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Sang Putu Sukarasa, S.H	5106031808740001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada					

**2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, M.M	5106022610640002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Drs. I Gede Suryawan, M.Si	5106021711590001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Sang Putu Sukarasa, S.H	5106031808740001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut Hubungan anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada					



**F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

**1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp319.800.000,00	3	Rp308.555.569,00
2.	Tunjangan	3	Rp1.452.889.797,00	3	Rp0,00
3.	Tantiem	3	Rp133.989.283,00	3	Rp44.663.094,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
<b>Total</b>			<b>Rp1.906.679.080,00</b>		<b>Rp353.218.663,00</b>
Penjelasan Lebih Lanjut : Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS					

**2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	0 (3)	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil (3)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS (3)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut : untuk fasilitas yang didapatkan oleh Direksi tercantum dalam Keputusan Bupati No 31 Tahun 2009 fasilitas perumahan tidak diberikan dalam bentuk rumah			



## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan (a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,35 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,5 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,83 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	27 Januari 2022	3	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan pendekatan ke Pemerintah Daerah terkait dengan penambahan modal</li><li>2. Melakukan penyelesaian AYDA</li><li>3. Mencadangkan PPAP</li><li>4. Pergantian Core Banking System</li><li>5. Menciptakan kolaborasi produk dengan bunga ringan untuk penggiat UMKM</li><li>6. Pembukaan operasional kantor kas pelayanan di wilayah Penelokan, Kintamani</li><li>7. Melakukan pengawasan terhadap hasil tindak lanjut pemeriksaan baik Intern maupun ekstern yang direkomendasi SPI</li></ol>
2	21 Maret 2022	7	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat aturan yang lebih jelas dan tegas perihal pemberian reward bagi pegawai.</li><li>2. Membuatkan pakta integritas dan wajib ditandatangani oleh pegawai yang memperoleh reward pendidikan reguler</li><li>3. Segera merevisi SK Direksi Nomor 41 Tahun 2009</li><li>4. Pelaksanaan rekrutmen dievaluasi terutama psikotest agar lebih detail terkait karakter pegawai</li><li>5. Rekrutmen berikutnya menekankan pada Psikotest.</li></ol>



3.	23 Juni 2022	3	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Melakukan perubahan Rencana Bisnis BPR Tahun 2022</li><li>2 Membuat strategi yang efektif untuk mencapai target bisnis BPR</li><li>3 Melengkapi struktur organisasi khususnya SPI dan Auditor</li><li>4 Meminta ke Direksi untuk menindaklanjuti dan ditembuskan ke Komisaris</li></ol>
4	25 Juli 2022	3	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Yang perlu mendapat perhatian yaitu NPL yang masih belum tercapai sesuai target pada semester I Tahun 2022</li><li>2 Mengevaluasi data nasabah Deposito dan melakukan pemasaran langsung kepada Calon Deposan</li><li>3 Jabatan SPI yang lama kosong untuk segera diisi menjelang pemeriksaan OJK</li><li>4 Tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK Tahun 2021 yang belum ditindaklanjuti agar segera ditindaklanjuti</li></ol>
5	07 November 2022	13	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Fokus kegiatan mengglobal terkait penanganan pengejaran laba, terdiri dari pengejaran bunga tertunggak dan pengembalian PPAP</li><li>2 Pengejaran bunga tertunggak dan pengembalian PPAP dibuatkan action plan mencakup bagaimana mengerjakan, siapa mengerjakan dan kapan dikerjakan. Akan disampaikan Kanwa, 10 Nopember 2022</li><li>3. Dalam kegiatan mengglobal ini dalam upaya peningkatan laba, Dirul sebagai Koordinator dan Dirbis sebagai sekretaris/penyusunan data, dengan melibatkan Pejabat Eksekutif dan staf</li><li>4. Evaluasi yang melibatkan dewan komisaris akan dilaksanakan setiap 1 minggu 2 kali yaitu senin dan kamis</li><li>5 Tetap semangat dan bekerja keras dalam upaya peningkatan laba, namun apabila nanti hasilnya kurang maksimal agar disosialisasikan kepada seluruh pegawai karena akan berpengaruh terhadap penerimaan jasa produksi dan hak lainnya.</li><li>6. Perlu dilakukan penyegaran termasuk mutasi untuk tetap menjaga semangat dan garah dalam melaksanakan tugas sehingga hasilnya pun akan optimal.</li><li>7. Masalah teknis dalam pengambilan pekerjaan mengglobal ini menjadi tanggungjawab Direksi</li></ol>
6	07 November 2022	6	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Blangko CDO agar segera disebarikan di pelayanan</li><li>2 Daftar nama terorisme segera disebarikan kepada petugas di pelayanan</li><li>3 Seluruh perangkat kebijakan tentang penerapan APU dan PPT segera dilengkapi paling lambat 30 Nopember 2022 (SOP, contoh form/blangko)</li><li>4 Pelatihan teknis penerapan APU dan PPT dilakukan internal setelah SOP selesai</li></ol>

**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI

Telepon (0366) 91054

Website bankdaerahbangli.co.id Email info@bankdaerahbangli.co.id

			<ol style="list-style-type: none"><li>5. Pelatihan APU dan PPT akan diisi oleh narasumber yang kompeten dan telah memiliki sertifikat</li><li>6. Sosialisasi dan/atau pelatihan kepada pegawai agar dilaksanakan paling lambat tanggal 20 Desember 2022</li><li>7. Tahun 2023 akan dilakukan 2 (dua) kali rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi terkait penerapan APU dan PPT</li><li>8. PE Kepatuhan, MR serta APU dan PPT wajib membuat laporan internal kepada Dewan Komisaris perihal penerapan APU dan PPT sebelum rapat Dekom dan Direksi dilaksanakan</li></ol>
7.	24 Oktober 2022	3	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berdasarkan laporan keuangan publikasi September 2022 dengan pembandingan 2021 penurunan laba yang disebabkan adanya pendapatan non operasional Tahun 2021</li><li>2. Kredit yang bermasalah untuk dilakukan langkah-langkah sesuai dengan PKPB</li><li>3. AYDA yang sudah jatuh tempo untuk dilakukan penilaian kembali dan dilakukan penjualan.</li><li>4. Hasil pemeriksaan OJK Tahun 2022 untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan komitmen dan hasil pemeriksaan tahun 2021 yang belum ditindaklanjuti agar segera ditindaklanjuti</li></ol>
8.	25 November 2022	3	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rencana Bisnis Bank Tahun 2023 dapat disetujui</li><li>2. Dilakukan evaluasi realisasi Rencana bisnis bank rutin setiap bulan secara kontinyu pencapaian maupun kendala-kendala yang dihadapi</li><li>3. Melakukan langkah-langkah kongkrit untuk pencapaian laba di tahun buku 2020 sesuai target</li><li>4. Pencapaian laba di tahun 2022 agar diusahakan pencapaiannya melebihi tahun 2021</li></ol>
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun			--

**2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris**

No	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, M.M	5106022610640002	5	0	100%
2	Drs. I Gede Suryawan, M.Si	5106021711590001	5	0	100%
3	Sang Putu Sukarasa, S.H	5106031808740001	5	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut					

**I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)**

Jumlah Penyimpangan Internal* (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum	Tahun Laporan	Tahun Sebelum	Tahun Laporan	Tahun Sebelum	Tahun Laporan	Tahun Sebelum	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut								

**J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi**

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		

**K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									





Penjelasan Lebih Lanjut :

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

#### L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	04 April 2022	Sosial	Kontes Bonsai Dengan Pemberian 1 Unit Motor Beat CBS Hitam (Off The Road) Dalam Rangka HUT Kabupaten Bangli Ke 818 Tahun 2022.	Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia Cabang Bangli	Rp14.814.300,00
2.	13 Mei 2022	Sosial	Persiapan Kegiatan Porprov 2022	Lembaga Karate-Di Indonesia	Rp3.000.000,00
3.	25 Mei 2022	Sosial	Pembangunan Bale Gong Pura Dalem Pingit Banjar Adat Kawan	Banjar Adat Kawan	Rp15.000.000,00
4.	31 Mei 2022	Sosial	Perayaan HUT Bangli Ke-818 Berupa Guest Star (3 bintang tamu)	Panitia Peringatan Hut Bangli ke-818	Rp30.000.000,00
5.	17 Juni 2022	Sosial	Lomba dan Pameran Burung Berkicau Dengan Tajuk "Bangli Era Baru Cup 2"	Pelestari Burung Indonesia (PBI) Cabang Bangli	Rp10.000.000,00
6.	28 Juli 2022	Sosial	Peringatan HUT RI Ke 77 Di Kecamatan Susut	Panitia Peringatan Hut RI Di Kecamatan Susut	Rp5.000.000,00
7.	09 Agustus 2022	Sosial	Revalidasi Batur Unesco Global Geopark	Pengelola Batur Unesco Global Geopark	Rp10.000.000,00
8.	16 September 2022	Sosial	Lomba Pementasan Tari Topeng Keras	ST Wisnu Murti	Rp2.500.000,00
9.	13 Oktober 2022	Sosial	Kegiatan Motor Trail Adventure	X Rocks Adventure 2022	Rp3.000.000,00
10.	23 November 2022	Sosial	Bantuan Untuk Gempa Bumi Di Cianjur	Perbarnida	Rp2.000.000,00
11.	06 Desember 2022	Sosial	Pemberian Bantuan Berupa 2 Buah Tempat Sampah 100L Grey	Desa Adat Jelekungkang	Rp959.800,00
12.	12 Desember	Sosial	HUT Korpri Ke 51	Bagian	Rp5.000.000,00



**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI**

Telepon (0366) 91054

Website bankdaerahbangli.co.id Email info@bankdaerahbangli.co.id

2022			Yang Dirangkakan Dengan HUT PGRI Ke 77	Pemerintahan Setda Kabupaten Bangli	
13	12 Desember 2022	Sosial	HUT Ke 23 Dharma Wanita Dengan Pelaksanaan Kegiatan Sosial	Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bangli	Rp5 000 000,00
14	15 Desember 2022	Sosial	Pemberian Bantuan Berupa Mesin Sensor Chainsaw 52 CC RED	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli	Rp2 429 100,00
15	21 Desember 2022	Sosial	HUT SMA N 1 Bangli Ke 58 Dan Pembentukan Serta Pelantikan Pengurus Ikatan Alumni SMA N 1 Bangli.	Panitia Reuni Agung SMA N 1 Bangli	Rp10.000 000,00
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					

BANGLI, 31 Januari 2023

PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)

**E. IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA, M.M.**  
KOMISARIS UTAMA

**I. MADASTAWA**  
DIREKTUR UTAMA



**KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR  
TAHUN 2022  
BOBOT BPR B**

**HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA**

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Keterangan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 1	0.2	Secara umum Direksi PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terutama terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 1.21	0.182	Seluruh Anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	-
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 1	0.1	Tidak terdapat benturan kepentingan selama Tahun 2022
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 1.21	0.121	Penerapan Kepatuhan BPR tergolong baik selama Tahun 2022
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 1.23	0.123	Pelaksanaan fungsi audit intern berjalan secara efektif, independen dan objektif
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 1	0.025	Pelaksanaan Audit oleh KAP dilaksanakan secara efektif dengan kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 1.55	0.155	Belum diterapkan
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 1.2	0.09	Tidak ada pelanggaran BMPK

Deviasi antara target dan realisasi RBB adalah moderate



**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI**

Telepon: (0366) 91054

Website: bankdaerahbangli.co.id. Email: info@bankdaerahbangli.co.id

B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 1	0.075	
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 1.5	0.113	Bank telah melaksanakan transparansi dengan mempublikasikan terkait laporan keuangan setiap triwulan melalui surat kabar
<b>Nilai Komposit</b>		<b>1.2</b>	
<b>Peringkat Komposit</b>		<b>1</b>	
<b>Predikat Komposit</b>		<b>Sangat Baik</b>	



**B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	1	Modal PT BPR Bank Daerah Bangli Periode 31 Desember 2022 telah sebesar Rp 23.014.384.289, sehingga tergolong kedalam BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000, namun demikian Direksi saat ini telah berjumlah 3 orang yang salah satu Direksi bertindak sebagai Direktur Kepatuhan
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Berdasarkan data alamat Direksi Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten Bangli
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)	1	Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, perusahaan non Bank
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris	1	Direksi Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan direksi lainnya maupun dengan Dewan Komisaris
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/ atau penyedia jasa	1	Direksi tidak menggunakan penasihat/ konsultan perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus



	profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		dimaksud.
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya	1	Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dan telah diangkat / ditetapkan oleh RUPS sesuai SK Bupati Bangli No.539/455/2018 dan SK Bupati Bangli No. 539/358/2019
	<b>Total</b>	<b>6</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.5</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain	1	Hasil Temuan Audit Tahun 2022 secara keseluruhan telah ditindaklanjuti
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris	1	Direksi memberikan Data dan informasi yang lengkap kepada Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat	1	Keputusan Rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR	1	Direksi tidak menggunakan BPR untuk



	untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		kepentingan pribadi
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/ pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Berdasarkan laporan biaya pendidikan Tahun 2022 Direksi telah mengikut sertakan pegawai BPR dalam pendidikan / pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan kepada pegawai
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati- hatian.	1	Direksi mampu mengimplementasikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi melaksanakan pedoman sesuai dengan tata tertib
	<b>Total</b>	<b>8</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.4</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dalam laporan Tahunan
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang	1	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis lewat apel setiap hari Senin dan



**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI**

Telepon: (0366) 91054

Website: [bankdaerahbangli.co.id](http://bankdaerahbangli.co.id) Email: [info@bankdaerahbangli.co.id](mailto:info@bankdaerahbangli.co.id)

kepegawaian.		Kamis dan/atau pertemuan insidental
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1 Rapat Direksi dituangkan dalam risalah Rapat dan di arsip dengan baik
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1 Direksi dan Pegawai telah terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan terbukti dari dalam situasi covid 19, dari sisi Laba dan Aset dapat bertumbuh
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1 Direksi menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola sesuai dengan POJK No.04/POJK.03/2015
<b>Total</b>		<b>5</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>1</b>
<b>Bobot</b>		<b>0.1</b>
<b>Nilai Struktur</b>		<b>0.1</b>





**B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

<b>Kode</b>	<b>Kriteria / Indikator</b>	<b>Skala Penerapan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari 3 orang. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli No.539/318/2020 tentang pengangkatan Ir Ida Bagus Gde Giri Putra,MM sebagai Ketua Dewan Pengawas Periode 2020-2024 dan SK Bupati No.539/319/2020 tentang pengangkatan Sang Putu Sukarasa,SH sebagai anggota Dewan Pengawas periode 2020-2024 dan SK Bupati No.539/357/2019 tentang pengangkatan Drs I Gede Suryawan Msi sebagai Anggota Dewan Pengawas periode 2019-2023



**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI**

Telepon (0366) 91054

Website [bankdaerahbangli.co.id](http://bankdaerahbangli.co.id) Email [info@bankdaerahbangli.co.id](mailto:info@bankdaerahbangli.co.id)

---



**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI**

Telepon: (0366) 91054

Website: bankdaerahbangli.co.id. Email: info@bankdaerahbangli.co.id

S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan	1	Jumlah Anggota Dewan Komisaris yaitu 3 orang sama dengan Jumlah Anggota Direksi
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Ketiga Dewan Komisaris bertempat tinggal di Provinsi yang sama
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)

**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI

Telepon: (0366) 91054

Website: bankdaerahbangli.co.id. Email: info@bankdaerahbangli.co.id

	Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)		
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak ada merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris di tempat lain
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Dewan Komisaris lain atau Direksi
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
<b>Total</b>		<b>10</b>	
<b>Rata-rata</b>		<b>1.11</b>	
<b>Bobot</b>		<b>0.5</b>	
<b>Nilai Struktur</b>		<b>0.56</b>	



P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR	2	Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis dalam laporan pelaksanaan Rencana kerja BPR
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam keputusan kegiatan operasional
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstem, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	2	Dewan Komisaris memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit interen maupun eksteren
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris	1	Dewan Komisaris telah melakukan rapat paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal	1	Pengambilan keputusan Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat



tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat

P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi
-------	---	---	--

P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
-------	---	---	---

<b>Total</b>	<b>11</b>
--------------	-----------

<b>Rata-rata</b>	<b>1.30</b>
------------------	-------------

<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>
--------------	------------

<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.55</b>
-----------------------	-------------

#### Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil Rapat Dewan Penaawas dituangkan dalam risalah rapat dan diarsip dengan baik
-------	--	---	---

<b>Total</b>	<b>1</b>
--------------	----------

<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>
------------------	----------

<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>
--------------	------------

<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.1</b>
-----------------------	------------



**B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite**

<b>Kode</b>	<b>Kriteria / Indikator</b>	<b>Skala Penerapan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	<b>Total</b>	0	
	<b>Rata-rata</b>	0	
	<b>Bobot</b>	0.5	
	<b>Nilai Struktur</b>	0	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko	0	Tidak dinilai
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	0	Tidak dinilai
	<b>Total</b>	0	
	<b>Rata-rata</b>	0	
	<b>Bobot</b>	0.4	
	<b>Nilai Struktur</b>	0	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai



**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI**

Telepon: (0366) 91054

Website: [bankdaerahbangli.co.id](http://bankdaerahbangli.co.id). Email: [info@bankdaerahbangli.co.id](mailto:info@bankdaerahbangli.co.id)

<b>Total</b>	<b>0</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>0</b>
<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>
<b>Nilai Struktur</b>	<b>0</b>





## B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR sudah memiliki pedoman penanganan benturan kepentingan sesuai SK Direksi No 39 Tahun 2017
<b>Total</b>		<b>1</b>	
<b>Rata-rata</b>		<b>1</b>	
<b>Bobot</b>		<b>0.5</b>	
<b>Nilai Struktur</b>		<b>0.5</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut	1	Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang merugikan BPR
<b>Total</b>		<b>1</b>	
<b>Rata-rata</b>		<b>1</b>	
<b>Bobot</b>		<b>0.4</b>	
<b>Nilai Struktur</b>		<b>0.4</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik	1	Bila terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR dalam setiap keputusan maka BPR melakukan langkah langkah yang perlu diambil



**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI**

Telepon (0366) 91054

Website [bankdaerahbangli.co.id](http://bankdaerahbangli.co.id) Email [info@bankdaerahbangli.co.id](mailto:info@bankdaerahbangli.co.id)

<b>Total</b>	<b>1</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>
<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>
<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.1</b>



**B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan**

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	Direktur kepatuhan tidak menangani penyaluran Dana
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Direktur kepatuhan memahami peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	Telah ada Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Satuan Kerja Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR sudah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang secara bertahap sudah melakukan pengkinian terhadap pedoman dengan sistem kepatuhan dan sudah termuat dalam uraian tugas dan sudah dilaksanakan
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR mempunyai ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab bagi satuan kerja dan Jobdes
<b>Total</b>		<b>6</b>	
<b>Rata-rata</b>		<b>1.2</b>	
<b>Bobot</b>		<b>0.5</b>	
<b>Nilai Struktur</b>		<b>0.6</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang	1	Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR sudah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan



**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI**

Telepon (0366) 91054

Website: bankdaerahbangli.co.id Email: info@bankdaerahbangli.co.id

	diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya		melakukan sosialisasi dan memastikan bahwa semua unit di satuan kerja melaksanakannya
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	1	Direktur Kepatuhan telah melaksanakan sosialisasi terhadap ketentuan internal dan eksternal
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan	1	Direktur Kepatuhan telah melakukan review terhadap semua kebijakan BPR dan memastikan bahwa semua kebijakan yg dibuat telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang undangan lainnya
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan	2	setiap kebijakan dan komitmen yang dibuat oleh BPR selalu dilakukan kontrol oleh Direktur kepatuhan melalui Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	setiap kebijakan dan komitmen yang dibuat oleh BPR selalu dilakukan kontrol oleh Direktur Kepatuhan melalui PE Kepatuhan & Manajemen Risiko. PE Kepatuhan & Manajemen Risiko mengendalikan penyusunan SOP dan ketentuan intern bersama-sama PE Lainnya
	<b>Total</b>	<b>6</b>	



**B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern**

<b>Kode</b>	<b>Kriteria / Indikator</b>	<b>Skala Penerapan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern	<b>1</b>	BPR Telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit interen sesuai Peraturan Direksi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda)
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	<b>1</b>	Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit interen telah memiliki pedoman kerja
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	<b>1</b>	Telah dilaksanakan Audit terhadap pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	<b>1</b>	Sesuai dengan Jobdes dari SKAI atau Pejabat Eksekutif telah bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern	<b>2</b>	Dalam pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit interen BPR mengadakan pelatihan dan pendidikan reguler setiap ada kesempatan
<b>Total</b>		<b>6</b>	
<b>Rata-rata</b>		<b>1.2</b>	
<b>Bobot</b>		<b>0.5</b>	
<b>Nilai Struktur</b>		<b>0.6</b>	



**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**

P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	BPR telah menerapkan Audit terhadap kegiatan operasional sesuai dengan pedoman audit intern dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Otoritas Jasa Keuangan mengenai Standar Pelaksanaan Audit Intern
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun alas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 000 000 000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 000 000 000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang, menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	1	dalam pelaksanaan audit intern (kegiatan audit telah dilaksanakan secara memadai dan independen sesuai dengan ketentuan)
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	1	BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait pelaksanaan fungsi audit intern
<b>Total</b>		<b>5</b>	
<b>Rata-rata</b>		<b>1.25</b>	
<b>Bobot</b>		<b>0.4</b>	
<b>Nilai Struktur</b>		<b>0.5</b>	

**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**

H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada	1	Telah disampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan ke Direktur Kepatuhan
-------	--	---	---



**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI**

Telepon: (0366) 91054

Website [bankdaerahbangli.co.id](http://bankdaerahbangli.co.id). Email: [info@bankdaerahbangli.co.id](mailto:info@bankdaerahbangli.co.id)

	Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan		
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Telah disampaikan laporan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak eksterin kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan setiap pengangkatan dan pemberhentian PE Audit Interen kepada OJK
	<b>Total</b>	<b>5</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1.25</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.13</b>	



**B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5 b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	<b>Total</b>	<b>1</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.5</b>	

**Proses Penerapan Tata Kelola (P)**

P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5 c) Bobot BPR A dan	1	Dalam pelaksanaan Audit Laporan Keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh persetujuan RUPS dengan Usulan Dewan Komisaris
-------	---	---	--





	Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.		
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Hasil dari pada Audit Laporan Keuangan oleh KAP telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.4</b>	

**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**

H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5 c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	1	Hasil audit Laporan Keuangan oleh KAP telah selesai pada bulan Februari 2022
H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom	1	Cakupan hasil Audit KAP sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan



skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5 c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.

<b>Total</b>	<b>2</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>
<b>Bobot</b>	<b>0.1</b>
<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.1</b>



**B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern**

Kode	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko	2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan belum ada penetapan limit Risiko.
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	1	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
<b>Total</b>		<b>4</b>	
<b>Rata-rata</b>		<b>1.33</b>	
<b>Bobot</b>		<b>0.5</b>	
<b>Nilai Struktur</b>		<b>0.67</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	1	Direksi: Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	1	Dewan Komisaris: Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan	2	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan

**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI

Telepon: (0366) 91054

Website: bankdaerahbangli.co.id. Email: info@bankdaerahbangli.co.id

	pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material		pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
<b>Total</b>		<b>12</b>	
<b>Rata-rata</b>		<b>1.71</b>	
<b>Bobot</b>		<b>0.4</b>	
<b>Nilai Struktur</b>		<b>0.68</b>	

**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**

H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
<b>Total</b>		<b>4</b>	
<b>Rata-rata</b>		<b>2</b>	
<b>Bobot</b>		<b>0.1</b>	



**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI**

**Telepon: (0366) 91054**

**Website: [bankdaerahbangli.co.id](http://bankdaerahbangli.co.id). Email: [info@bankdaerahbangli.co.id](mailto:info@bankdaerahbangli.co.id)**

---

**Nilai Struktur**

**0.2**



**B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit**

<b>Kode</b>	<b>Kriteria / Indikator</b>	<b>Skala Penerapan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR	<b>1</b>	BPR telah memiliki Pedoman kebijakan Perkreditan (PKPB)
<b>Total</b>		<b>1</b>	
<b>Rata-rata</b>		<b>1</b>	
<b>Bobot</b>		<b>0.5</b>	
<b>Nilai Struktur</b>		<b>0.5</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	<b>2</b>	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan Sistem dan Prosedur BMPK
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	<b>1</b>	Proses pemberian Kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan atau pemberian Kredit besar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
<b>Total</b>		<b>3</b>	
<b>Rata-rata</b>		<b>1.5</b>	
<b>Bobot</b>		<b>0.4</b>	
<b>Nilai Struktur</b>		<b>0.6</b>	
<b>Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>			



**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI**

Telepon: (0366) 91054

Website: [bankdaerahbangli.co.id](http://bankdaerahbangli.co.id). Email: [info@bankdaerahbangli.co.id](mailto:info@bankdaerahbangli.co.id)

H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Tidak ada pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1	BPR Tidak melanggar dan atau melampui BMPK
<b>Total</b>		<b>2</b>	
<b>Rata-rata</b>		<b>1</b>	
<b>Bobot</b>		<b>0.1</b>	
<b>Nilai Struktur</b>		<b>0.1</b>	



<b>Total</b>	<b>2</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>1</b>
<b>Bobot</b>	<b>0.4</b>
<b>Nilai Struktur</b>	<b>0.4</b>

**Hasil Penerapan Tata Kelola (H)**

H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<b>1</b>	Rencana Bisnis BPR disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
<b>Total</b>		<b>1</b>	
<b>Rata-rata</b>		<b>1</b>	
<b>Bobot</b>		<b>0.1</b>	
<b>Nilai Struktur</b>		<b>0.1</b>	





**B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**

<b>Kode</b>	<b>Kriteria / Indikator</b>	<b>Skala Penerapan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yg didukung oleh SIM yang memadai serta dengan SDM yang kompeten
	<b>Total</b>	<b>2</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>2</b>	
	<b>Bobot</b>	<b>0.5</b>	
	<b>Nilai Struktur</b>	<b>1</b>	
<b>Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1	Laporan Keuangan Publikasi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan Setiap Triwulanan dengan materi sesuai dengan ketentuan
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1	Laporan Tahunan BPR memuat informasi umum, opini dari akuntan publik serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa	1	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk penggunaan data Nasabah sesuai dengan pedoman dan persyaratan kepada Otoritas Jasa Keuangan

**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI

Telepon (0366) 91054

Website [bankdaerahbangli.co.id](http://bankdaerahbangli.co.id) Email [info@bankdaerahbangli.co.id](mailto:info@bankdaerahbangli.co.id)

Keuangan			
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1	Penyusunan Laporan disusun sesuai dengan ketentuan otoritas Jasa Keuangan
<b>Total</b>		<b>4</b>	
<b>Rata-rata</b>		<b>1</b>	
<b>Bobot</b>		<b>0.4</b>	
<b>Nilai Struktur</b>		<b>0.4</b>	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan Tahunan dan Laporan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan ke Otoritas jasa Keuangan dan atau dipublikasikan lewat Surat Kabar sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu	1	Laporan Penanganan Pengaduan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
<b>Total</b>		<b>2</b>	
<b>Rata-rata</b>		<b>1</b>	
<b>Bobot</b>		<b>0.1</b>	
<b>Nilai Struktur</b>		<b>0.1</b>	



**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI**

**Telepon: (0366) 91054**

**Website [bankdaerahbangli.co.id](http://bankdaerahbangli.co.id). Email: [info@bankdaerahbangli.co.id](mailto:info@bankdaerahbangli.co.id)**

---

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)  
TAHUN 2022**



**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI  
TELEPON: (0366) 91054**



**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI**

Telepon: (0366) 91054

Website [bankdaerahbangli.co.id](http://bankdaerahbangli.co.id) Email [info@bankdaerahbangli.co.id](mailto:info@bankdaerahbangli.co.id)

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan POJK Nomor 4/ POJK 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/ SEOJK 03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 5/ SEOJK 03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, maka berdasarkan hal tersebut PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) membuat serta melaporkan hasil dari pelaksanaan Tata Kelola yang telah diterapkan. Laporan ini selain untuk memenuhi kewajiban kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat pula digunakan untuk kepentingan Stakeholder untuk mengetahui secara jelas tentang kinerja BPR, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tata Kelola perusahaan yang baik juga didukung dengan berbagai unsur-unsur penting yang meliputi peran aktif seluruh Karyawan Bank, penerapan fungsi kepatuhan yang efektif, pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko yang optimal. Tata Kelola yang dilaksanakan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders (pemangku kepentingan) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola.

PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) sebagai Lembaga Intermediasi harus memastikan bahwa seluruh bagian dalam perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yaitu antara lain:

1. Keterbukaan (transparency)
2. Akuntabilitas (accountability)
3. Pertanggungjawaban (responsibility)
4. Independensi (independency)
5. Kewajaran (fairness)

Untuk tercapainya PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) yang sehat, maju dan berkembang, maka dengan ini kami berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (TATA KELOLA-GCG) dengan menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi dengan bertandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola.



## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	<p><b>Nama</b> : IRI MADE ASTAWA</p> <p><b>Jabatan</b> : Direktur Utama</p> <p><b>Tugas dan Tanggung Jawab</b></p> <p><b>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja BPR</li><li>2. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas di Bagian Umum dan SDM, Bagian Operasional dan SPI</li><li>3. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Direksi berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian</li><li>4. Memastikan dukungan sarana, prasarana termasuk informasi dan Teknologi serta sumber daya manusia untuk kelancaran operasional dalam mencapai sasaran bisnis</li><li>5. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direktur Bisnis, apabila Direktur Bisnis berhalangan hadir karena sakit, cuti atau melaksanakan tugas Dinas</li></ol>
2.	<p><b>Nama</b> : I WAYAN KARDI, S.E</p> <p><b>Jabatan</b> : Direktur</p> <p><b>Tugas dan Tanggung Jawab</b></p> <p><b>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Bisnis</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bertanggung jawab atas pencapaian penghimpunan dana dari masyarakat</li><li>2. Bertanggung jawab atas penyaluran dana kepada masyarakat sesuai sasaran yang telah ditetapkan</li><li>3. Menetapkan cara-cara penagihan kembali atas kredit yang telah diberikan kepada debitur yang menunggak secara efektif dan efisien</li><li>4. Menyelenggarakan penghapusbukuan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan.</li><li>5. Melaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris yang disertai dengan langkah-langkah perbaikan yang sedang dan/atau akan dilakukan mengenai<ol style="list-style-type: none"><li>a. Perkembangan dan jumlah dana yang dapat dihimpun dari tabungan dan deposito berjangka, serta sumber-sumber dana lainnya</li><li>b. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dan debitur inti</li><li>c. Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit non performing</li><li>d. Menindaklanjuti temuan-temuan penting dalam perkreditan dari dana yang merupakan laporan hasil pengawasan oleh pengawas intern maupun ekstern</li><li>e. Pelaksanaan rencana perkreditan dan penghimpunan dana sebagaimana tertuang dalam rencana kerja yang disampaikan kepada OJK</li><li>f. Memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan bank) dan perkembangan kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi</li></ol></li></ol>



**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI**

Telepon: (0366) 91054

Website: bankdaerahbangli.co.id Email: info@bankdaerahbangli.co.id

bisnis bank

g. Menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas di Bagian Pemasaan, Pembinaan dan Pengawasan Debitur dan Bagian Kredit.

h. Menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab Direktur Utama pada saat Direktur Utama berhalangan hadir karena sakit, cuti atau melaksanakan tugas Dinas.

3. Nama : I NENGAH PICARAWAN, S.H.

Jabatan : Direktur

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan

1. Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh POJK dan perundang-undangan lainnya dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan.

2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan

3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain.

4. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan atau ketentuan/SOP intern.

5. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank

6. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR

7. Melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris terkait pelanggaran Kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi.

8. Melaporkan secara khusus terkait kebijakan Direksi/Keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Dir Kep telah menyimpang dari POJK dan/ atau peraturan perundang-undangan lainnya dan laporan ini disampaikan kepada OJK.

9. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis.

10. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi

11. Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait manajemen risiko.

12. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.

13. Mengevaluasi, memberikan opini atau rekomendasi terhadap transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

14. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank

15. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Dewan Komisaris, dapat disampaikan tindak lanjutnya sebagai berikut

1. Telah diisi jabatan SPI dan staf fungsional auditor pada tanggal 5 September 2022.

2. Telah ditetapkan dan dilaksanakan secara rutin kegiatan sabtu belajar sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas SDM

3. Telah diberikan reward kepada pegawai dengan 5 (lima) kategori, dimana masing-masing kategori terdiri dari juara 1 sampai juara 3 Untuk juara 1 dimasing-masing kategori diberikan reward berupa pendidikan reguler gratis dengan jenis program pendidikan yang ditetapkan oleh Perusahaan

Penjelasan Lebih Lanjut



Nihil

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1	<p>Nama Ir Ida Bagus Gde Giri Putra, M M</p> <p>Jabatan Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengawasan BPR</li><li>2 Meneliti rencana strategis bisnis (Corporate Plan) rencana kerja tahunan dan anggaran BPR sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan</li><li>3 Memberi saran dan pertimbangan diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan BPR</li><li>4 Menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPR</li><li>5 Minta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR.</li><li>6 Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tanggung jawab Direksi yaitu dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank serta memberikan nasehat kepada Direksi</li><li>7 Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li><li>8 Mengkoordinasikan tugas-tugas Anggota Dewan Komisaris</li></ol>
2	<p>Nama Drs I Gede Suryawan, M Si</p> <p>Jabatan Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direktur Bisnis dalam menjalankan operasional BPR yang meliputi di bidang perkreditan dan penghimpunan dana</li><li>2 Meneliti rencana kerja di bidang perkreditan, portofolio KAP dan penghimpunan dana pihak ketiga sebelum diserahkan ke Kepala Daerah untuk disahkan</li><li>3 Mengawasi dan meneliti neraca laporan laba rugi yang disampaikan oleh Direktur Utama untuk mendapatkan pengesahan Kepala Daerah</li><li>4 Meneliti kinerja Direktur Bisnis dalam menjalankan tugas sesuai struktur organisasi</li><li>5 Memohon keterangan kepada Direktur Bisnis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR khususnya di bidang Perkreditan dan penghimpunan dana pihak ketiga</li><li>6 Mengawasi, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi terkait tugas dan tanggung jawab Direktur Bisnis dalam pelaksanaan kebijakan di bidang Perkreditan dan penghimpunan dana pihak ketiga</li></ol>
3	<p>Nama Sang Putu Sukarasa, S H</p> <p>Jabatan Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direktur Kepatuhan dalam</li></ol>





menjalankan tugas dan wewenangnya.

2 Melaksanakan pengawasan terhadap BPH untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

3 Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal dan rekomendasi dari Auditor Eksternal serta hasil pengawasan pihak Otoritas

4 Menilai kinerja Direktur Kepatuhan dalam menjalankan tugasnya sesuai POJK Nomor 4/ POJK 03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan POJK Nomor 13/ POJK 03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR

5 Meminta keterangan kepada Direktur Kepatuhan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tata kelola dan Manajemen Risiko

6 Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh BPR agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku

7 Memberikan pertimbangan kepada Direktur Kepatuhan terkait temuan yang wajib dilaporkan kepada OJK seperti:

a Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan

b Keadaan atau perubahan keadaan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR.

c Kondisi ini wajib dilaporkan paling lambat 10 hari kerja sejak diketahui

8 Melakukan pengawasan dan memberikan saran terkait kelengkapan sarana dan prasarana pendukung dan ketersediaan serta kualitas SDM dalam mengoptimalkan operasional dan bisnis BPR

**Rekomendasi Kepada Direksi**

**Rekomendasi**

1 Guna terlaksananya Tata Kelola Perusahaan yang baik, maka Jabatan SPI dan Auditor agar segera diisi

2 Guna terwujudnya target target perusahaan perlu didukung dengan kualitas SDM, oleh karena itu pelatihan SDM agar dilaksanakan secara konsisten

3 Untuk mendorong pegawai berlomba-lomba untuk berprestasi dalam upaya mencapai target perlu diberikan penghargaan baik dalam bentuk material maupun non material. Pemberian penghargaan tersebut agar diberikan secara berkelanjutan

**Penjelasan Lebih Lanjut**

Nihil

**3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)**

**a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite**

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab Tidak ada
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab Tidak ada
3	Komite Rekrutasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab Tidak ada



**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI**

Telepon: (0366) 91054

Website: bankdaerahbangli.co.id Email: info@bankdaerahbangli.co.id

Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite  
Bank Daerah Bangli tidak memiliki Komite Audit

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

No	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1				
2				
3				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		tidak ada rekomendasi independensi anggota komite	Rekomendasi keahlian dan	struktur dan

**c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit Program Realisasi Jumlah Rapat
2	Komite Pemantau Risiko Program Realisasi Jumlah Rapat
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Program Realisasi Jumlah Rapat
Penjelasan Lebih Lanjut tidak ada program kerja dan realisasi program kerja komite	

**B. Kepemilikan Saham Direksi**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	IRIMADE ASTAWA	Rp0,00	0%
2	IWAYAN KARDI, S.E	Rp0,00	0%

**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI

Telepon: (0366) 91054

Website: bankdaerahbangli.co.id Email: info@bankdaerahbangli.co.id

3	I NENGAH PICARAWAN, S H	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR tidak ada			

**2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain**

No	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	IR I MADE ASTAWA			0%
2	I WAYAN KARDI, S E			0%
3	I NENGAH PICARAWAN, S H			0%
Penjelasan Lebih Lanjut Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan lain tidak ada				

**C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham****1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Direksi	Anggota Direksi Lain	Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	IR I MADE ASTAWA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	I WAYAN KARDI, S E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	I NENGAH PICARAWAN, S H	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut Hubungan keuangan Anggota Direksi pada BPR tidak ada				

**2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Direksi	Anggota Direksi Lain	Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	IR I MADE ASTAWA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	I WAYAN KARDI, S E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	I NENGAH PICARAWAN, S H	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut Hubungan keluarga anggota Direksi pada BPR tidak ada				



#### D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

##### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, M.M.	Rp0,00	0%
2	Drs. I Gede Suryawan, M.Si	Rp0,00	0%
3	Sang Putu Sukarasa, S.H	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut Kepemilikan saham anggota dewan komisaris pada BPR tidak ada			

##### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Dewan Komisaris	Salah Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, M.M.			0%
2	Drs. I Gede Suryawan, M.Si			0%
3	Sang Putu Sukarasa, S.H			0%
Penjelasan Lebih Lanjut Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan lain tidak ada				

#### E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

##### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, M.M.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Drs. I Gede Suryawan, M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Sang Putu Sukarasa, S.H	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada				



## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, M.M	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Drs. I Gede Suryawan, M.Si	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Sang Putu Sukarasa, S.H.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut				
Hubungan anggota Dewan Komisaris pada BPR tidak ada				

## F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	Rp319.800.000,00	3	Rp308.555.569,00
2	Tunjangan	3	Rp1.452.889.797,00	3	Rp0,00
3	Tantien	3	Rp133.989.283,00	3	Rp44.663.094,00
4	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp1.906.679.080,00		Rp353.218.663,00
Penjelasan Lebih Lanjut					
Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS					

**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI

Telepon. (0366) 91054

Website [bankdaerahbangli.co.id](http://bankdaerahbangli.co.id) Email [info@bankdaerahbangli.co.id](mailto:info@bankdaerahbangli.co.id)**2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS**

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	0 (3)	Tidak ada
2	Transportasi	Mobil (3)	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS (3)	Tidak ada
4	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut  
untuk fasilitas yang didapatkan oleh Direksi tercantum dalam Keputusan Bupati No 31 Tahun 2009  
fasilitas perumahan tidak diberikan dalam bentuk rumah

**G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah**

Keterangan	Perbandingan (a/b) 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.35 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.5 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.83 1

Penjelasan Lebih Lanjut

**H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris****1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun**

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	27 Januari 2022	3	1 Melakukan pendekatan ke Pemerintah Daerah terkait dengan penambahan modal 2 Melakukan penyelesaian AYDA 3 Mencadangkan PPAF 4 Pergantian Core Banking System



**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI**

Telepon. (0366) 91054

Website: bankdaerahbangli.co.id Email: info@bankdaerahbangli.co.id

			<ul style="list-style-type: none"><li>5. Menciptakan kolaborasi produk dengan bunga ringan untuk penggiat UMKIM</li><li>6. Pembukaan operasional kantor kas pelayanan di wilayah Penelokan, Kintamani</li><li>7. Melakukan pengawasan terhadap hasil tindak lanjut pemeriksaan baik intern maupun ekstern yang direkomendasi SPI</li></ul>
2	21 Maret 2022	7	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Membuat aturan yang lebih jelas dan tegas perihal pemberian reward bagi pegawai</li><li>2. Membuatkan pakta integritas dan wajib ditandatangani oleh pegawai yang memperoleh reward pendidikan reguler</li><li>3. Segera merevisi SK Direksi Nomor 41 Tahun 2009</li><li>4. Pelaksanaan rekrutmen dievaluasi terutama psikotest agar lebih detail terkait karakter pegawai</li><li>5. Rekrutmen berikutnya menekankan pada Psikotest</li></ul>
3	23 Juni 2022	3	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan perubahan Rencana Bisnis BPR Tahun 2022</li><li>2. Membuat strategi yang efektif untuk mencapai target bisnis BPR</li><li>3. Melengkapi struktur organisasi khususnya SPI dan Auditor</li><li>4. Meminta ke Direksi untuk menindaklanjuti dan ditembuskan ke Komisaris</li></ul>
4	25 Juli 2022	3	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Yang perlu mendapat perhatian yaitu NPL yang masih belum tercapai sesuai target pada semester I Tahun 2022</li><li>2. Mengevaluasi data nasabah Deposito dan melakukan pemasaran langsung kepada Calon Deposan</li><li>3. Jabatan SPI yang lama kosong untuk segera diisi, menjelang pemeriksaan OJK</li><li>4. Tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK Tahun 2021 yang belum ditindaklanjuti agar segera ditindaklanjuti.</li></ul>
5	07 November 2022	13	<ul style="list-style-type: none"><li>1. Fokus kegiatan mengglobal terkait penanganan pengejaran laba, terdiri dari pengejaran bunga tertunggak dan pengembalian PPAP</li><li>2. Pengejaran bunga tertunggak dan pengembalian PPAP dibuatkan action plan mencakup bagaimana mengerjakan, siapa mengerjakan dan kapan dikerjakan. Akan disampaikan Kamis, 10 Nopember 2022</li><li>3. Dalam kegiatan mengglobal ini dalam upaya peningkatan laba, Dirut sebagai Koordinator dan Dirbis sebagai sekretaris/penyiapan data, dengan melibatkan Pejabat Eksekutif dan staf</li><li>4. Evaluasi yang melibatkan dewan komisaris akan dilaksanakan setiap 1 minggu 2 kali yaitu senin dan kamis</li><li>5. Tetap semangat dan bekerja keras dalam upaya peningkatan laba, namun apabila nanti hasilnya</li></ul>



<p>kuang maknawi agar disosialisasikan kepada seluruh pegawai karena akan berpengaruh terhadap penerimaan jasa produksi dan hak lainnya.</p> <p>6. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap mutasi untuk tetap menjaga semangat dan gairah dalam melaksanakan tugas sehingga hasilnya pun akan optimal</p> <p>7. Masalah teknis dalam pengambilan pekerjaan mengglobal ini menjadi tanggungjawab Direksi</p>			
<p>1. Blangko CDD agar segera disebarkan di pelayanan</p> <p>2. Daftar nama terorisme segera disebarkan kepada petugas di pelayanan</p> <p>3. Seluruh perangkat kebijakan tentang penerapan APU dan PPT segera dikompilasi paling lambat 30 Nopember 2022 (SOP, contoh form/bangko)</p> <p>4. Pelatihan teknis penerapan APU dan PPT dilakukan internal setelah SOP selesai</p> <p>5. Pelatihan APU dan PPT akan diisi oleh narasumber yang kompeten dan telah memiliki sertifikasi</p> <p>6. Sosialisasi dan/atau pelatihan kepada pegawai agar dilaksanakan paling lambat tanggal 20 Desember 2022</p> <p>7. Tahun 2023 akan dilakukan 2 (dua) kali rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi terkait penerapan APU dan PPT</p> <p>8. PE Keperluan, MR serta APU dan PPT wajib membuat laporan internal kepada Dewan Komisaris perihal penerapan APU dan PPT sebelum rapat Direksi dan Direksi dilaksanakan</p>	6	07 November 2022	
<p>1. Berdasarkan laporan keuangan publikasi September 2022 dengan perbandingan 2021 penurunan laba yang disebabkan adanya pendapatan non operasional Tahun 2021</p> <p>2. Kredit yang bermasalah untuk dilakukan langkah-langkah sesuai dengan PKPB</p> <p>3. AVDA yang sudah jatuh tempo untuk dilakukan penilaian kembali dan dilakukan penjualan</p> <p>4. Hasil pemeriksaan OJK Tahun 2022 untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan komitmen dan hasil pemeriksaan tahun 2021 yang belum ditindaklanjuti agar segera ditindaklanjuti</p>	3	24 Oktober 2022	
<p>1. Rencana Bisnis Bank Tahun 2023 dapat disetujui</p> <p>2. Dilakukan evaluasi realisasi Rencana Bisnis bank rutin setiap bulan secara kontinyu pencapaian maupun kendala-kendala yang dihadapi</p> <p>3. Melakukan langkah-langkah konkret untuk pencapaian laba di tahun 2023 agar disahkan pencapaian laba di tahun 2023</p> <p>4. Pencapaian laba di tahun 2023 agar disahkan pencapaian laba di tahun 2023</p>	3	25 November 2022	





## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Ir. Ida Bagus Gde Gin Putra, M.M	5	0	100%
2	Drs. I Gede Suryawan, M.Si	5	0	100%
3	Sang Putu Sukarasa, S.H	5	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut:				
-				

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal* (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut:								
-								

**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI

Telepon: (0366) 91054

Website bankdaerahbangli.co.id Email info@bankdaerahbangli.co.id

**J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi**

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		

**K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan**

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1							
2							
3							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan							

**L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik**

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	04 April 2022	Sosial	Kontes Bonsai Dengan Pemberian 1 Unit Motor Beat CBS Hitam (Off The Road) Dalam Rangka HUT Kabupaten Bangli Ke 818 Tahun 2022	Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia Cabang Bangli	Rp14.814.300,00
2	13 Mei 2022	Sosial	Persiapan Kegiatan Porprov 2022	Lembaga Karate-Di Indonesia	Rp3.000.000,00
3	25 Mei 2022	Sosial	Pembangunan Bale Gong Pura Dalem Pingit Banjar Adat Kawan	Banjar Adat Kawan	Rp15.000.000,00
4	31 Mei 2022	Sosial	Perayaan HUT Bangli Ke-818 Berupa Guest Star	Paritia Peringatan Hut Bangli ke-818	Rp30.000.000,00

**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)****JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI**

Telepon (0366) 91054

Website [bankdaerahbangli.co.id](http://bankdaerahbangli.co.id) Email [info@bankdaerahbangli.co.id](mailto:info@bankdaerahbangli.co.id)

(3 bintang tamu)					
5	17 Juni 2022	Sosial	Lomba dan Pameran Burung Berkicau Dengan Tajuk "Bangli Era Baru Cup 2"	Pelestari Burung Indonesia (PBI) Cabang Bangli	Rp10.000.000,00
6	28 Juli 2022	Sosial	Peringatan HUT RI Ke 77 Di Kecamatan Susut	Panitia Peringatan Hut RI Di Kecamatan Susut	Rp5.000.000,00
7	09 Agustus 2022	Sosial	Revalidasi Batur Unesco Global Geopark	Pengelola Batur Unesco Global Geopark	Rp10.000.000,00
8	16 September 2022	Sosial	Lomba Pementasan Tari Topeng Keras	ST Wisnu Murti	Rp2.500.000,00
9	13 Oktober 2022	Sosial	Kegiatan Motor Trail Adventure	X Rocks Adventure 2022	Rp3.000.000,00
10	23 November 2022	Sosial	Bantuan Untuk Gempa Bumi Di Cianjur	Perbarnida	Rp2.000.000,00
11	06 Desember 2022	Sosial	Pemberian Bantuan Berupa 2 Buah Tempat Sampah 100L Grey	Desa Adat Jelekungkang	Rp959.800,00
12	12 Desember 2022	Sosial	HUT Korpri Ke 51 Yang Dirangkakan Dengan Hut PGRI Ke 77	Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bangli	Rp5.000.000,00
13	12 Desember 2022	Sosial	HUT Ke 23 Dharma Wanita Dengan Pelaksanaan Kegiatan Sosial	Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bangli	Rp5.000.000,00
14	15 Desember 2022	Sosial	Pemberian Bantuan Berupa Mesin Sensor Chainsaw 52 CC RED	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli	Rp2.429.100,00
15	21 Desember 2022	Sosial	HUT SMA N 1 Bangli Ke 58 Dan Pembentukan Serta Pelantikan Pengurus Ikatan Alumni SMA N 1 Bangli	Panitia Reuni Agung SMA N 1 Bangli	Rp10.000.000,00

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik



### BAB III

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)
Alamat	JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI
Nomor Telepon	(0366) 91054
Posisi Laporan	Desember 2022
Modal Inti	Rp23 014 384 289,00
Total Aset	Rp271 666 567 416,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA) Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1,2 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1,00	0,200
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1,21	0,182
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0,00	0,000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1,00	0,100
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1,21	0,121
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1,23	0,123
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1,00	0,025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1,55	0,155
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1,20	0,090
10	Rencana Bisnis BPR	1,00	0,075
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1,50	0,113
Nilai Komposit			
Predikat Komposit			



## **B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1)**

Secara umum Direksi PT BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terutama terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.21)**

Seluruh Anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)**

Tidak terdapat benturan kepentingan selama Tahun 2022

### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.21)**

Penerapan Kepatuhan BPR tergolong baik selama Tahun 2022

### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.23)**

Pelaksanaan fungsi audit intern berjalan secara efektif, independen dan objektif

### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)**

Pelaksanaan Audit oleh KAP dilaksanakan secara efektif dengan kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen

### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.55)**

Belum diterapkan

### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.2)**

Tidak ada pelanggaran BMPK

### **10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)**

Deviasi antara target dan realisasi RBB adalah moderate



**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI**

Telepon. (0366) 91054

Website [bankdaerahbangli.co.id](http://bankdaerahbangli.co.id) Email [info@bankdaerahbangli.co.id](mailto:info@bankdaerahbangli.co.id)

**11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.5)**

Bank telah melaksanakan transparansi dengan mempublikasikan terkait laporan keuangan setiap triwulan melalui surat kabar

**C. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa

BANGLI, 31 Januari 2023

**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**



**II. IGA BAGUS ODE GIRI PUTRA, M.M.**  
KOMISARIS UTAMA

**II. TMADE ASTAWA**  
DIREKTUR UTAMA



## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)
Alamat	JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI
Nomor Telepon	(0366) 91054
Posisi Laporan	Desember 2022
Modal Inti	Rp23.014.384.289,00
Total Aset	Rp271.666.567.416,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA) Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.2 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1	0.2
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.21	0.182
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1	0.1
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.21	0.121
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.23	0.123
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.55	0.155
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.2	0.09
10	Rencana Bisnis BPR	1	0.075
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.5	0.113
Nilai Komposit			
Peringkat Komposit			
Predikat Komposit			



## **B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1)**

Secara umum Direksi PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia terutama terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.21)**

Seluruh Anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen dan melaksanakan tugas secara efektif

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1)**

Tidak terdapat benturan kepentingan selama Tahun 2022

### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.21)**

Penerapan Kepatuhan BPR tergolong baik selama Tahun 2022

### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.23)**

Pelaksanaan fungsi audit intern berjalan secara efektif, independen dan objektif

### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)**

Pelaksanaan Audit oleh KAP dilaksanakan secara efektif dengan kualitas dan cakupan hasil audit sangat baik serta dilaksanakan secara independen

### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.55)**

Belum diterapkan

### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.2)**

Tidak ada pelanggaran BMPK

### **10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)**

Deviasi antara target dan realisasi RBB adalah moderate

### **11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.5)**





**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

**JALAN MERDEKA NO 27 BANGLI**

**Telepon: (0366) 91054**

**Website: bankdaerahbangli.co.id. Email: info@bankdaerahbangli.co.id**


Bank telah melaksanakan transparansi dengan mempublikasikan terkait laporan keuangan setiap triwulan melalui surat kabar

### **C. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa.

**BANGLI, 31 Januari 2023**

**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**

  
**I. IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA, M.M.**  
**KOMISARIS UTAMA**

  
**Ir. MADE ASTAWA**  
**DIREKTUR UTAMA**



## **LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami menyatakan bahwa

**Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA) Tahun 2022**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
2. POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
3. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
4. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA) selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di Industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BANGLI, 31 Januari 2023

**PT BPR BANK DAERAH BANGLI (PERSERODA)**



**Ir. IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA, M.M.**  
KOMISARIS UTAMA

α

**Ir. FMADE ASTAWA**  
DIREKTUR UTAMA